

**PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN LITERASI  
DIGITAL TERHADAP KINERJA ASN DALAM MEWUJUDKAN SMART  
GOVERNANCE DI KOTA METRO, LAMPUNG**

*(Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Metode Penelitian Administrasi Publik)*



NAMA : RENA FEBI YOLANDA

NPM : 2456041043

KELAS : MANDIRI B

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pelayanan publik adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kebijakan yang dibuat pemerintah akan langsung dirasakan oleh warga melalui kualitas layanan publik yang diberikan. Jika pelayanan ini dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, jika pelayanan berjalan lambat, rumit, atau tidak adil, hal itu dapat menimbulkan ketidakpuasan dan berisiko menurunkan legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan birokrasi dan kinerja pemerintah secara menyeluruh (Khairudin, Soewito, & Aminah, 2021).

Sejak era reformasi, Indonesia mulai mengedepankan agenda reformasi birokrasi dengan mengusung prinsip-prinsip good governance seperti keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Harapannya, penerapan prinsip-prinsip tersebut mampu memperbaiki kualitas layanan publik yang sebelumnya dianggap belum maksimal. Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi, baik dari sisi kelembagaan, peraturan, maupun kapasitas sumber daya manusia dalam birokrasi. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan perubahan struktur, tetapi juga membutuhkan transformasi budaya kerja dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) (Khairudin, Soewito, & Aminah, 2021).

Salah satu strategi penting yang dijalankan pemerintah adalah digitalisasi layanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi mendorong munculnya konsep e-government. Seiring waktu, konsep ini berkembang menjadi smart governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang tidak hanya berbasis digital, tetapi juga menekankan kolaborasi, keterbukaan, akuntabilitas, serta penggunaan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan kata lain, smart governance bukan hanya soal penggunaan

aplikasi atau sistem elektronik, melainkan juga mencakup integrasi antara teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan (Indrayani, 2020).

Dalam konteks global, smart governance menjadi model tata kelola pemerintahan modern yang diyakini mampu menjawab tantangan zaman. Di era Revolusi Industri 4.0, birokrasi dituntut untuk lebih adaptif, tanggap, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pemerintah daerah, termasuk di Indonesia, perlu mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pelayanan publik agar menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Namun, penerapan smart governance tidak lepas dari berbagai hambatan. Tantangan seperti rendahnya literasi digital di kalangan ASN, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi budaya birokrasi masih menjadi kendala utama dalam proses digitalisasi pemerintahan (Togala, Aرسالim, & Parisu, 2025).

Literasi digital ASN menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi smart governance. ASN yang memiliki kemampuan digital yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem elektronik dan mampu menggunakan teknologi secara lebih produktif. Literasi digital mencakup keterampilan dalam mengakses, memahami, mengelola, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan kerja sehari-hari. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi digital ASN di banyak wilayah masih belum merata, bahkan terdapat kesenjangan yang cukup besar antara ASN yang terbiasa dengan teknologi dan yang masih belum akrab dengan penggunaannya. Situasi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diberikan (Wulandari, Priatna, & Andikaputra, 2022).

Di samping literasi digital, faktor kepemimpinan juga memiliki peran besar dalam mendukung transformasi birokrasi. Pemimpin dalam struktur birokrasi memiliki posisi strategis untuk memberikan arahan, menjadi teladan, serta memotivasi bawahannya agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Gaya kepemimpinan transformasional dianggap relevan dalam mendorong birokrasi menuju era digital karena menekankan empat dimensi penting: pengaruh ideal, motivasi yang menginspirasi, rangsangan intelektual, dan perhatian terhadap individu. Melalui pendekatan ini, seorang pemimpin dapat mendorong ASN untuk tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas kinerja. Kinerja ASN sebagai ujung tombak birokrasi menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pelayanan publik. ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, inovatif, dan produktif. Namun, kinerja ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh gaya kepemimpinan, budaya kerja, dan kemampuan teknologi. Penelitian

membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan semangat kerja ASN, yang akhirnya berdampak positif terhadap kinerja organisasi. Lebih dari itu, hasil kerja ASN akan lebih optimal jika ditunjang dengan literasi digital yang memadai (Putra, Syahrul, & Yuliharsi, 2023).

Literasi digital dan gaya kepemimpinan transformasional memiliki hubungan yang erat dalam mendorong perubahan birokrasi. Pemimpin dengan gaya transformasional mampu mendorong ASN untuk mengembangkan keterampilan digitalnya melalui pelatihan, motivasi, serta penciptaan budaya kerja yang inovatif. Di sisi lain, ASN yang sudah memiliki literasi digital akan lebih cepat tanggap terhadap arahan pimpinan dan lebih siap melakukan inovasi dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu, perpaduan antara literasi digital dan kepemimpinan transformasional diyakini mampu memperkuat kinerja ASN dalam menjawab tantangan implementasi smart governance (Wiyanto, 2024).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mendorong digitalisasi birokrasi melalui sejumlah regulasi. Salah satu kebijakan penting adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini menekankan pentingnya integrasi sistem informasi, keterpaduan data, dan peningkatan kemampuan ASN dalam bidang teknologi informasi. SPBE menjadi kerangka utama dalam mengembangkan smart governance di Indonesia, karena melalui regulasi ini diharapkan tercipta efisiensi, keterbukaan, dan perbaikan kualitas layanan publik (Indrayani, 2020).

Namun dalam praktiknya, penerapan SPBE di tingkat daerah menunjukkan hasil yang bervariasi. Ada daerah yang berhasil membangun sistem layanan digital dengan baik, sementara daerah lainnya masih mengalami berbagai kendala yang cukup kompleks. Hambatan yang sering dihadapi antara lain terbatasnya infrastruktur, kuatnya budaya birokrasi yang kaku, serta rendahnya literasi digital di kalangan ASN. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan transformasional sangat penting karena pemimpin yang memiliki visi dapat menjadi penggerak perubahan, meskipun berada dalam keterbatasan (Addarisalam, Supriana, & Budi, 2025).

Kota Metro di Provinsi Lampung juga menghadapi tantangan serupa. Sebagai daerah otonom, Kota Metro diharapkan mampu menyelenggarakan layanan publik yang responsif dan berbasis digital. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar serta kebutuhan pelayanan yang beragam, Kota Metro dituntut untuk meningkatkan kapasitas birokrasi yang dimilikinya. Di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik, pemerintah daerah harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Untuk mewujudkan smart governance di

Kota Metro, diperlukan ASN yang memiliki kemampuan digital yang baik dan dipimpin oleh sosok pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional (Suriyani, 2025).

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah. Jika dulu pelayanan publik lebih banyak dilakukan secara langsung dengan prosedur manual yang sering kali rumit, kini masyarakat mengharapkan layanan yang cepat, transparan, dan bisa diakses kapan saja melalui perangkat digital. Perubahan harapan dari masyarakat ini mendorong birokrasi untuk melakukan transformasi, tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dalam pola kerja para ASN. Penggunaan teknologi informasi dalam birokrasi saat ini bukan lagi sebuah opsi, melainkan menjadi sebuah keharusan, terutama di era digital yang terus berkembang (Indrayani, 2020).

Dalam kajian e-government, terdapat beberapa tahapan dalam penerapan digitalisasi pemerintahan, dimulai dari penyediaan informasi secara daring, layanan interaktif, transaksi digital, hingga integrasi sistem secara menyeluruh dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia telah memulai langkah menuju e-government sejak awal tahun 2000-an, dan kini terus bergerak menuju arah smart governance. Meski begitu, tingkat pencapaiannya bervariasi di setiap daerah, tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, serta kualitas kepemimpinan di masing-masing wilayah (Indrayani, 2020).

Dalam kaitannya dengan kinerja ASN, literasi digital menjadi aspek yang sangat krusial. ASN saat ini tidak hanya perlu memahami penggunaan teknologi dasar, tetapi juga dituntut mampu mengelola data, berkomunikasi melalui media digital, serta memanfaatkan berbagai aplikasi elektronik dalam tugas sehari-hari. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Priatna, dan Andikaputra (2022) mengungkapkan bahwa tingkat literasi digital ASN di Kabupaten Sumedang masih bervariasi. Beberapa ASN sudah terbiasa dengan penggunaan aplikasi pelayanan publik digital, namun masih banyak pula yang kesulitan beradaptasi karena keterbatasan keterampilan dan minimnya pelatihan. Kondisi ini mencerminkan tantangan serupa yang terjadi di banyak daerah lain di Indonesia, termasuk Kota Metro.

Rendahnya literasi digital di kalangan ASN bisa berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik. ASN yang belum terbiasa menggunakan teknologi biasanya bekerja lebih lambat, rentan melakukan kesalahan administratif, dan kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas utama dalam program reformasi birokrasi. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga

mencakup pemahaman tentang etika dalam penggunaan teknologi, keamanan data, serta kesiapan mental untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat (Wulandari, Priatna, & Andikaputra, 2022).

Di sisi lain, literasi digital ASN juga sangat berkaitan dengan budaya organisasi. Wiyanto (2024) menekankan bahwa kinerja ASN akan lebih optimal jika lingkungan kerjanya mendukung pembelajaran berkelanjutan serta inovasi. Budaya kerja yang menghargai inovasi akan mendorong ASN untuk lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi dalam pekerjaannya. Dalam hal ini, peran pemimpin sangat penting. Tanpa dukungan dari pimpinan, ASN cenderung tetap nyaman dengan cara kerja lama yang manual dan kurang efisien (Wiyanto, 2024).

Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang dianggap tepat untuk menjawab tantangan birokrasi modern. Pemimpin transformasional tidak hanya fokus pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga membangun visi jangka panjang yang mampu menginspirasi bawahannya. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan keteladanan yang berlandaskan integritas, motivasi kerja yang dibangun melalui visi yang kuat, dorongan untuk berpikir kritis dan inovatif, serta perhatian khusus terhadap pengembangan individu ASN. Harapannya, ASN tidak hanya bekerja sesuai prosedur, tetapi juga terdorong untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan organisasi (Wicaksono, 2023).

Berbagai penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara kepemimpinan transformasional dan peningkatan kinerja pegawai. Putra, Syahrul, dan Yuliharsi (2023) menemukan bahwa gaya kepemimpinan ini memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa selain berdampak langsung terhadap kinerja, kepemimpinan transformasional juga memiliki efek tidak langsung melalui peningkatan perilaku kerja inovatif. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional sangat berperan dalam mendorong ASN untuk beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan, khususnya di era digital (Putra, Syahrul, & Yuliharsi, 2023).

Namun demikian, kepemimpinan transformasional tidak akan efektif jika tidak disertai dengan kemampuan digital yang memadai dari para ASN. Pemimpin bisa memberikan dorongan dan motivasi, tetapi jika ASN belum menguasai keterampilan digital, proses transformasi birokrasi tetap akan terhambat. Karena itu, diperlukan adanya sinergi antara kepemimpinan transformasional dan literasi digital di kalangan ASN. Kombinasi ini dapat mempercepat

perubahan dalam birokrasi, karena pemimpin mampu membangun semangat inovasi, sementara ASN memiliki kemampuan teknologi untuk mewujudkannya (Suriyani, 2025).

Dalam ranah kebijakan, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kapasitas ASN. Melalui berbagai pelatihan berbasis teknologi, ASN didorong agar lebih siap menghadapi perkembangan digital yang pesat. Salah satu program strategis yang dijalankan adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE menekankan pentingnya integrasi sistem layanan, penyediaan data yang akurat, serta peningkatan kompetensi ASN dalam pengoperasian teknologi informasi. Program ini menjadi pondasi utama bagi terwujudnya smart governance di Indonesia (Indrayani, 2020).

Meskipun kebijakan tersebut telah disusun secara nasional, pelaksanaannya di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Addarisalam, Supriana, dan Budi (2025) menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam implementasi smart governance di daerah adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan ASN. Selain itu, terdapat pula resistensi terhadap perubahan, di mana sebagian ASN masih enggan meninggalkan cara kerja manual dan sulit beradaptasi dengan sistem digital. Situasi ini memperlihatkan bahwa perubahan budaya kerja dalam birokrasi tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi baru, tetapi memerlukan dukungan kepemimpinan yang kuat dan komitmen ASN untuk berubah (Addarisalam, Supriana, & Budi, 2025).

Kota Metro di Provinsi Lampung juga mengalami tantangan serupa dalam upaya mengembangkan pelayanan publik berbasis digital. Sebagai kota pendidikan dengan penduduk yang beragam, Metro memiliki kebutuhan layanan publik yang kompleks, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, ASN di Kota Metro diharapkan mampu beradaptasi dengan teknologi digital untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan responsif. Namun, kesiapan tersebut sangat bergantung pada tingkat literasi digital ASN dan gaya kepemimpinan yang diterapkan di masing-masing instansi (Khairudin, Soewito, & Aminah, 2021).

Kepemimpinan transformasional di lingkungan birokrasi Kota Metro diharapkan mampu berperan sebagai katalisator perubahan, mendorong ASN agar meningkatkan keterampilan digital mereka. Seorang pemimpin yang inspiratif dapat mengatasi resistensi ASN terhadap perubahan, memotivasi mereka untuk mengikuti pelatihan, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung inovasi. Dengan kombinasi antara literasi digital yang memadai dan

kepemimpinan transformasional yang efektif, kinerja ASN akan meningkat, sehingga pelaksanaan smart governance di Kota Metro bisa berjalan lebih optimal (Suriyani, 2025).

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi Kota Metro juga menyangkut keterbatasan infrastruktur digital dan anggaran. Namun, hambatan teknis ini sejatinya bisa diatasi apabila ASN memiliki literasi digital yang baik dan pemimpin birokrasi mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Togala, Arsalim, dan Parisu (2025) menegaskan bahwa smart governance hanya dapat terwujud melalui integrasi antara teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang visioner. Tanpa integrasi ini, proses transformasi birokrasi hanya akan berjalan setengah jalan dan tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas layanan publik (Togala, Arsalim, & Parisu, 2025).

Transformasi birokrasi ke arah digital bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan strategi penting yang menentukan daya saing suatu daerah. Daerah yang mampu menerapkan layanan publik berbasis digital akan lebih dipercaya oleh masyarakat dan memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi serta mendukung pembangunan. Sebaliknya, daerah yang lambat dalam beradaptasi dengan digitalisasi berisiko mengalami penurunan legitimasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas ASN dan hadirnya kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan menjadi hal yang sangat krusial (Indrayani, 2020).

Kapasitas ASN tidak hanya dapat diukur dari latar belakang pendidikan formal, tetapi juga dari kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Literasi digital kini menjadi salah satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki ASN. ASN dengan tingkat literasi digital yang baik akan lebih cepat memahami sistem pelayanan berbasis aplikasi, lebih akurat dalam mengelola data, dan lebih lancar dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui platform digital. Oleh karena itu, literasi digital memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja ASN. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Priatna, dan Andikaputra (2022) membuktikan bahwa rendahnya literasi digital di kalangan ASN bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan layanan berbasis teknologi dan menurunkan mutu pelayanan publik (Wulandari, Priatna, & Andikaputra, 2022).

Selain kemampuan digital, kepemimpinan transformasional juga menjadi unsur penting dalam mendorong perubahan di lingkungan birokrasi. Pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk membangun visi yang menyatukan, memberikan motivasi yang menginspirasi, serta mendorong pegawainya untuk berpikir kritis dan kreatif. Pemimpin seperti

ini mampu mengurangi resistensi terhadap perubahan karena tidak sekadar memberi perintah, tetapi juga mengajak ASN untuk memahami pentingnya perubahan demi peningkatan kualitas layanan. Studi oleh Putra, Syahrul, dan Yuliharsi (2023) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki dampak positif terhadap kinerja pegawai, terutama ketika disertai dengan perilaku kerja yang inovatif (Putra, Syahrul, & Yuliharsi, 2023).

Kinerja ASN menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan birokrasi. ASN yang berkinerja tinggi mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sebaliknya, ASN yang berkinerja rendah akan memperlambat proses layanan, meningkatkan beban birokrasi, dan menurunkan tingkat kepuasan publik. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja ASN menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan smart governance. Wiyanto (2024) menyatakan bahwa peningkatan kinerja ASN harus didukung oleh budaya organisasi yang mendukung inovasi serta kepemimpinan yang mendorong pembelajaran secara berkelanjutan (Wiyanto, 2024).

Sebagai salah satu kota di Provinsi Lampung, Kota Metro menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan smart governance. Sebagai kota pendidikan, Metro dituntut untuk menyajikan layanan publik yang cepat dan berbasis teknologi agar sejalan dengan karakter masyarakat yang semakin akrab dengan dunia digital. Namun kenyataannya, keterbatasan literasi digital di kalangan ASN masih menjadi kendala. Sebagian ASN masih lebih nyaman dengan metode kerja manual, sementara masyarakat sudah terbiasa menggunakan layanan digital dari sektor swasta. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah (Khairudin, Soewito, & Aminah, 2021).

Penerapan smart governance di Kota Metro juga masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal integrasi sistem informasi. Berbagai aplikasi pelayanan publik yang telah dikembangkan cenderung berjalan secara terpisah dan kurang terkoordinasi, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan secara menyeluruh. Penelitian oleh Addarisalam, Supriana, dan Budi (2025) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan smart governance di daerah mencakup lemahnya integrasi sistem, rendahnya literasi digital di kalangan ASN, serta kurangnya regulasi yang mendorong inovasi digital. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kinerja ASN tidak hanya bergantung pada kehadiran teknologi baru, tetapi juga pada peran kepemimpinan yang mampu mengarahkan perubahan ke arah yang positif (Addarisalam, Supriana, & Budi, 2025).

Dalam hal kepemimpinan, Kota Metro membutuhkan sosok pemimpin yang dapat menginspirasi ASN untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi. Pemimpin yang bersifat otoriter atau hanya terpaku pada rutinitas administratif cenderung sulit mendorong ASN untuk keluar dari pola kerja lama. Sebaliknya, pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan, memberikan motivasi yang kuat, dan mendorong bawahannya untuk terus belajar serta mengembangkan keterampilan digital. Dengan kehadiran gaya kepemimpinan seperti ini, ASN di Kota Metro akan lebih siap dan terbuka dalam menghadapi tantangan digitalisasi layanan publik (Wicaksono, 2023).

Literatur terbaru menunjukkan bahwa integrasi antara literasi digital dan kepemimpinan transformasional dapat memberikan dampak sinergis terhadap peningkatan kinerja ASN. Suriyani (2025) menegaskan bahwa pemimpin yang visioner dan partisipatif berperan penting dalam membentuk budaya literasi digital di lingkungan birokrasi. Dengan dukungan dan dorongan dari pemimpin, ASN akan merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat (Suriyani, 2025).

Secara akademis, kajian mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional dan literasi digital terhadap kinerja ASN masih belum banyak dilakukan, terutama dalam konteks daerah di luar pusat pemerintahan. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada kota-kota besar atau instansi di tingkat nasional. Padahal, penerapan smart governance di daerah seperti Kota Metro juga sangat relevan untuk diteliti karena setiap daerah memiliki karakter, tantangan, serta kapasitas birokrasi yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki peluang besar untuk mengisi kesenjangan literatur dengan memberikan sudut pandang baru tentang hubungan antara kepemimpinan transformasional, literasi digital, dan kinerja ASN di tingkat daerah (Togala, Arsalim, & Parisu, 2025).

Dari sisi praktis, penelitian ini sangat relevan untuk memberikan masukan konkret kepada Pemerintah Kota Metro dalam menyusun strategi peningkatan kapasitas ASN. Apabila hasil penelitian membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional dan literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kinerja ASN, maka temuan ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program pelatihan yang tepat sasaran. Program tersebut dapat dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan digital ASN, tetapi juga untuk menumbuhkan pemimpin transformasional yang mampu mendorong perubahan positif dalam birokrasi (Indrayani, 2020).

Penelitian ini juga memiliki nilai penting dalam konteks kebijakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB telah mendorong penerapan SPBE di seluruh wilayah Indonesia. Namun keberhasilan kebijakan tersebut sangat tergantung pada kesiapan dan kapasitas ASN di masing-masing daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata mengenai kondisi literasi digital serta gaya kepemimpinan di Kota Metro, yang kemudian bisa menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan penguatan ASN di tingkat lokal (Addarisalam, Supriana, & Budi, 2025).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu kepemimpinan transformasional, literasi digital, dan kinerja ASN dalam kerangka smart governance di Kota Metro memiliki urgensi yang tinggi. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur di tingkat daerah. Dari sisi praktis, ia menyajikan solusi nyata untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Dan dari sisi kebijakan, kajian ini mendukung arah pembangunan nasional yang menekankan pentingnya digitalisasi birokrasi. Oleh karena itu, pemilihan judul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Literasi Digital terhadap Kinerja ASN dalam Mewujudkan Smart Governance di Kota Metro, Lampung” merupakan langkah yang tepat dan sangat penting untuk dilakukan (Suriyani, 2025).

## DAFTAR PUSTAKA

- Addarisalam, A., Supriana, A., Budi, B. S., Ardyansyah, R., Riau, U. M., Alamat, I., Komersil, S., Ska, A. (, Tambusai, J. T., Delima, K., Tampan, K., & Pekanbaru, R. (2025). Tantangan dan Peluang Implementasi Smart Governance di Indonesia: Tinjauan Komparatif Literatur untuk Konteks Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 3(3), 114–125.
- Indrayani, E. (2020). E-Government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia (Buku Literatur MK E-Government). In *LPP Balai Insan Cendikia* (Issue March). [https://www.academia.edu/download/60457564/Buku\\_E-government20190901-116843-z73m6i.pdf](https://www.academia.edu/download/60457564/Buku_E-government20190901-116843-z73m6i.pdf)
- Khairudin, Soewito, & Aminah. (2021). Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia. In *Amerta Media* (Vol. 1).
- Putra, I., Syahrul, L., & Yuliharsi. (2023). The effect of digital literacy and transformational leadership on employee performance mediated by innovative work behavior at the Padang city population and civil registration service. *Enrichment : Journal of Management*, 12(6), 5014–5022. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i6.1124>
- Suriyani, E. (2025). *Governansi digital*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama). ISBN 978-634-01-0351-9.
- Risman Togala, A. C. Z. L. P. (2025). 4116–4123.
- Wicaksono, S. R. (2023). *Konsep Dasar E-Government* (Issue December). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8004026>
- Wulandari, I., Priatna, R., & Andikaputra Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik STIA LAN Bandung, F. A. (2022). SUMEDANG REGENCY ASN DIGITAL LITERACY (ASN Digital Literacy Improvement Strategy Sumedang Regency). *Jurnal PubBis*, 6(2), 192. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v6i2.638>